

BAB - IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Permasalahan Kondisi Fisik Wilayah

- 1) Struktur tanah yang tidak stabil, kondisi topografi wilayah Sumatera Utara khususnya di kawasan Pantai Barat dan kepulauan Nias sangat berbukit dan bergelombang mengakibatkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur;
- 2) Sebagian besar wilayah termasuk kedalam kawasan rawan bencana alam (banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, letusan gunung berapi, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain), sehingga menimbulkan limitasi pengembangan wilayah dan mitigasi bencana;
- 3) Adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang antara fungsi lindung dan budidaya (pertambangan, energi, infrastruktur, dan lain-lain) yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, ekonomi, lingkungan hidup, pertanahan dan pemerintahan;
- 4) Keberadaan pulau-pulau kecil, terdepan dan terluar di Pantai Barat (Pulau Simuk dan Pulau Wunga) dan Pantai Timur (Pulau Berhala) yang masih mengalami kekurangan fasilitas layanan dasar, rawan kondisi keamanan dan masih sulit dijangkau;

4.1.2. Permasalahan Kondisi Demografi

- 1) Masih cukup tingginya angka pertumbuhan penduduk dan adanya kecenderungan peningkatan pertumbuhan selama periode 2000-2010;
- 2) Ketimpangan distribusi penduduk yang mengakibatkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung lebih berkembang di daerah perkotaan;
- 3) Tingkat ketergantungan penduduk masih tinggi dengan rasio di atas 51 %;

4.1.3. Permasalahan Ekonomi, Keuangan dan Sumberdaya Alam

- 1) Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara belum sepenuhnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang ditunjukkan dilihat dari masih cukup tingginya angka pengangguran;
- 2) Menurunnya daya tarik investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara, bahkan cenderung beberapa perusahaan tutup atau relokasi dan keterbatasan infrastruktur daerah yang meliputi jalan, listrik dan gas;
- 3) Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi pada sektor industri.
- 4) Masih Tingginya Angka Ketimpangan Wilayah (*disparitas regional*), baik ketimpangan antar wilayah (*between region*) maupun ketimpangan dalam wilayah (*within region*) antara Kawasan Pantai Barat, Kawasan Dataran Tinggi dan Kawasan Pantai Timur yang terlihat dari angka Indeks Williamson.
- 5) Lemahnya daya saing produktivitas dan kualitas produk/jasa yang diproduksi sektor-sektor riil khususnya pertanian (pertanian rakyat dan perkebunan rakyat) dan industri

pengolahan untuk menembus pasar regional dan global akibat dari faktor ekonomi dan non-ekonomi dan ketidakmampuan sektor riil khususnya usaha kecil/menengah dalam menghasilkan produk-produk memenuhi standar mutu internasional, pengemasan dan produk yang ramah lingkungan merupakan masalah yang harus menjadi perhatian.

- 6) Belum tercapainya swasembada jagung dan daging;
- 7) Menurunnya kualitas kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan;
- 8) Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat serta ketidakberdayaan tenaga kerja dalam menghasilkan produktivitas dan mutu kerja yang tinggi terletak pada ketidakmampuan mereka mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan persaingan ekonomi global;
- 9) Terdapat permasalahan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei diantaranya penyediaan infrastruktur pendukung, peraturan-peraturan daerah yang memberikan kemudahan bagi investasi serta dukungan sumber daya manusia yang belum memadai;
- 10) Rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi akibat rendahnya kualitas infrastruktur pendukung berupa jalan/jembatan, transportasi, air bersih dan ketenagalistrikan;
- 11) Kurangnya Sumber Daya Masyarakat (SDM) dalam pengelolaan dan pengembangan serta pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan Koperasi baik itu aspek manajemen pengelolaan, *finance*, keanggotan, pemasaran, *raw material*, akses terhadap kebijakan

4.1.4. Permasalahan Sosial Budaya

4.1.4.1. Pendidikan, Kepemudaan, Seni Budaya dan Olah Raga

- 1) Masih adanya penduduk buta huruf pada usia diatas 15 tahun;
- 2) Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan yang melanjutkan sekolah ke Pendidikan Tinggi;
- 3) Masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah;
- 4) Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, sebagai tuntunan dalam peningkatan kualitas SDM;
- 5) Masih rendahnya kompetensi guru, dimana belum seluruh guru berpendidikan S1;
- 6) Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan;
- 7) Masih rendahnya rasio jenjang pendidikan terhadap peluang kerja;
- 8) Keterbatasan sarana dan prasarana keolahragaan dalam meningkatkan olah raga prestasi;
- 9) Masih rendahnya potensi pariwisata yang dijadikan destinasi pariwisata Nasional.

4.1.4.2. Kesehatan

- 1) Masih ditemukan permasalahan kekurangan gizi pada balita,
- 2) Masih cukup tingginya angka kematian bayi;
- 3) Masih cukup tingginya angka kematian ibu melahirkan yang diakibatkan keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan (rumah sakit/poliklinik, dokter/dokter spesialis, bidan/perawat);

- 4) Ancaman berbagai penyakit epidemik seperti HIV/AIDS, flu burung terutama demam berdarah memerlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu;
- 5) Masih terbatasnya SDM kesehatan;
- 6) Keberhasilan program Keluarga Berencana dalam mengurangi dampak tekanan demografi, masih belum didukung sepenuhnya oleh semua lapisan masyarakat.

4.1.4.3. Pengentasan Kemiskinan dan Penanggulangan Pengangguran

- 1) Masih cukup besarnya jumlah penduduk miskin;
- 2) Masih terbatasnya penyediaan lapangan pekerjaan karena terbatasnya investasi untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja khususnya bagi tenaga terampil dan terdidik yang terus bertambah setiap tahun.

4.1.4.4. Sosial

- 1) Masih maraknya berbagai penyakit sosial masyarakat berupa kriminalisme khususnya premanisme, pencurian kendaraan bermotor, penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti narkoba, prostitusi, dan lain-lain.

4.1.4.5. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- 1) Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai peserta Keluarga Berencana;
- 2) Masih terbatasnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana;
- 3) Masih belum optimalnya cakupan peserta KB aktif;
- 4) Masih besarnya rata-rata jumlah anak per keluarga.

4.1.4.6. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender;

- 1) Masih ditemukannya tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak-anak.
- 2) Rendahnya partisipasi perempuan di legislative dan pemerintahan;
- 3) Rendahnya komitmen pemerintah kabupaten/kota terhadap Kota Layak Anak;
- 4) Kapasitas SDM untuk melaksanakan PUG belum memadai;
- 5) Masih ditemukannya kasus trafficking;
- 6) Ketersediaan data terpilah Gender masih minim belum digunakan dalam siklus pembangunan.

4.1.4.7. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

- 1) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja;
- 2) Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam menciptakan lapangan usaha baru

- 3) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
- 4) Rendahnya kreativitas masyarakat transmigrasi dalam mengembangkan potensi lokasi transmigrasi untuk meningkatkan pendapatan perkapita;
- 5) Terbatasnya lahan transmigrasi yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketransmigrasian.

4.1.4.8. Pemberdayaan masyarakat dan desa

- 1) Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- 2) Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- 4) Belum optimalnya usaha ekonomi masyarakat;
- 5) Belum meratanya pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pemanfaatan sumber daya alam.

4.1.4.9. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

- 1) Masih terbatasnya sumber daya aparatur dengan disiplin ilmu tertentu;
- 2) Terbatasnya akses aparatur memperoleh pembekalan diri guna persiapan memasuki masa purnabakti;
- 3) Terbatasnya disiplin ilmu serta jenjang pendidikan yang ditempatkan pada masing-masing SKPD sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan;
- 4) Terbatasnya jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim untuk menduduki jabatan struktural di pemerintahan.

4.1.5. Permasalahan Penyediaan Sarana dan Prasarana

- 1) Belum optimalnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan), perhubungan, sumber daya air, energi dan fasilitas lainnya, khususnya pada daerah kabupaten yang berada didaerah yang sulit dijangkau;
- 2) Kondisi sebagian besar jalan-jalan di seluruh wilayah Sumatera Utara baik yang berstatus nasional, provinsi maupun kabupaten berada dalam keadaan yang kurang baik khususnya di Pantai Barat;
- 3) Masih kurangnya kelengkapan fasilitas keselamatan jalan dan angkutan jalan;
- 4) Jaringan kereta api yang ada belum memadai untuk sarana *Mass Rapid Transportation* dan mendukung pengembangan kawasan industri, perkebunan dan perkotaan;
- 5) Terbatasnya kapasitas Pelabuhan Belawan untuk dikembangkan akibat kondisi fisik memiliki kedalaman alur yang sangat terbatas sehingga tidak memadai untuk menunjang angkutan laut secara efektif;
- 6) Belum optimalnya fungsionalisasi pemandu moda transportasi menuju Bandara Kuala Namu;
- 7) Belum optimalnya ketersediaan kapasitas dan fasilitas bandar udara di kabupaten/kota seperti Bandar Udara Binaka, F.L. Tobing, Aek Godang, Lasondre, Silangit dan Sibisa serta pembangunan Bandar Udara perintis pada beberapa kabupaten/kota lainnya;

- 8) Belum optimalnya kapasitas dan fasilitas pelabuhan utama, pengumpan dan pengumpul ASDP dan terminal angkutan;
- 9) Pengembangan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana sumber daya air berupa irigasi dan rawa untuk peningkatan produksi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan;
- 10) Masih terbatasnya penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan pertanian;
- 11) Masih rendahnya cakupan layanan air minum, khususnya layanan perpipaan perkotaan dan sanitasi lingkungan;
- 12) Masih rendahnya kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah;
- 13) Masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan rumah bagi masyarakat;

4.1.6. Permasalahan Pemerintahan

- 1) Masih kurangnya peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di daerah otonom kabupaten dan kota tetap terpadu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Proses integrasi dan sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan masih mengalami kendala karena perbedaan kepentingan dan pandangan dalam menyikapi permasalahan di masyarakat;
- 3) Masih kurangnya kualitas pelayanan jasa oleh aparat pemerintah kepada masyarakat secara profesional melalui pemanfaatan *e-Government*;
- 4) Masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi yang ditunjukkan dari hasil audit BPK terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- 5) Belum optimalnya kerjasama pembangunan daerah, regional dan internasional.

4.1.7. Permasalahan Lingkungan Hidup

- 1) Tingginya degradasi hutan yang mengakibatkan merosotnya persediaan air, ancaman banjir, longsor dan menurunnya keanekaragaman hayati;
- 2) Potensi terjadinya krisis air untuk memenuhi kebutuhan domestik, industri, dan irigasi;
- 3) Penurunan kualitas kawasan lindung akibat pengusahaan hutan yang tidak terkendali;
- 4) Perubahan iklim yang tidak teratur (anomali iklim) antara lain terlihat dalam bentuk ketidak teraturan curah hujan, di sisi lain emisi gas rumah kaca Provinsi Sumatera Utara khususnya pada sektor kehutanan dan lahan gambut masih cukup tinggi;
- 5) Penurunan kualitas air sungai dan danau;
- 6) Penurunan kualitas udara akibat aktivitas transportasi dan industri terutama di kawasan perkotaan;
- 7) Kerusakan terumbu karang dan hutan mangrove akibat aktivitas masyarakat nelayan;
- 8) Pencemaran sumber air khususnya di Kawasan Danau Toba akibat pemanfaatan yang tidak tepat sesuai dengan zonasi dan peruntukannya sehingga mengganggu potensi besar Danau Toba sebagai daerah tujuan wisata di Sumatera Utara;
- 9) Rendahnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

- 10) Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 11) Masih adanya rumah penduduk tidak layak huni;
- 12) Masih belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi;
- 13) Mitigasi terhadap bencana berupa bahaya banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan angin, dan penanggulangan pasca bencana

4.2. Isu Strategis

4.2.1 Internasional :

- 1) Komitmen pencapaian pembangunan Millenium (MDG's) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB;
- 2) Meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya;
- 3) Menguatnya penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia yang terlalu menonjolkan hak-hak individu sehingga dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara umum;
- 4) Timbulnya kesadaran masyarakat dunia dalam menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang berdampak kepada pemanasan global (*Global Warming*) yang menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim di berbagai belahan bumi.
- 5) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, sebagai penguatan dalam menghormati terhadap hak asasi manusia dilihat dari parameter Gender.

4.2.2 Nasional :

- 1) Desentralisasi dan otonomi daerah yang diinterpretasi secara berbeda dan tidak terkontrol menjadi penghambat daya saing perekonomian daerah;
- 2) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang kurang tegas dan tidak memiliki petunjuk pelaksanaan mengakibatkan sering menimbulkan multi tafsir sehingga menyulitkan bagi aparat pemerintahan di daerah untuk membuat keputusan;
- 3) Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM;
- 4) Isu Lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan tuntutan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah yang tidak berbasis lingkungan;
- 5) Percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia mendukung Master plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi yang telah menetapkan Sumatera sebagai "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional" dan khusus untuk Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan beberapa proyek skala besar (Mega Project) untuk mendukung program MP3EI pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang telah ditetapkan sebagai KEK Pertama di Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012).
- 6) Masih adanya peraturan perundang-undangan yang belum Responsive Gender.

4.2.3 Provinsi :

- 1) Masih belum meratanya jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar pendidikan, serta belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di

pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di pedesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan;

- 2) Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah;
- 3) Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya;
- 4) Masih adanya desa tertinggal dengan kondisi terbatasnya infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian masyarakat serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih belum berkembang;
- 5) Optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran;
- 6) Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal;
- 7) Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/peremukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi lingkungan;
- 8) Pengurangan kesenjangan antar wilayah baik dari segi ekonomi maupun sosial;
- 9) Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah.
- 10) Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi ancaman bencana alam (mitigasi bencana);
- 11) Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan HAM serta ketentraman dan ketertiban;
- 12) Masih banyaknya infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan pembangunan pada kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan;
- 13) Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya serta optimalisasi dan efisiensi melalui peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah.
- 14) Belum berperan lembaga penggerak inti dan lembaga pelayanan dalam mendukung Pokja sebagaimana amanat Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.

4.2.4 Isu Strategis menurut Bidang

4.2.4.1. Bidang Agama

Isu global yang terkait dengan agama disadari sebagai suatu hal yang perlu terus diantisipasi agar agama terus dapat menjiwai seluruh gerak pembangunan Sumatera Utara. Isu-isu tersebut secara garis besar dapat dilihat dalam tiga hal :

- 1) Semakin dibutuhkannya peran agama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam mengatasi kemiskinan, keterbelakangan, dan rendahnya kualitas sumber daya umat beragama.
- 2) Semakin diharapkan peran agama dan keberagaan dalam penegakan hak-hak azasi manusia, kualitas lingkungan, dan kemitraan laki-laki dan perempuan.

- 3) Munculnya fundamentalisme dan radikalisme beragama menyebabkan sebagian masyarakat telah memunculkan pandangan yang kurang proporsional terhadap agama dan keberagamaan. Sedangkan secara regional Asia Tenggara yang selama ini dianggap sebagai basis masyarakat yang agamis dengan budi pekerti yang luhur tiba-tiba telah memperlihatkan kegerahan dan tidak bersemunya sifat halus dan lembut akibat hantaman pengaruh budaya bagian dunia yang selalu memperlihatkan kekerasan dan tiadanya sopan santun bermasyarakat, akibat globalisasi dunia yang menampilkan perubahan, keterbukaan, dan kebebasan, telah mendatangkan imbas yang dalam tingkat tertentu telah cenderung menjauhkan umat beragama dari ajaran agamanya.

Pada saat yang sama kemudahan-kemudahan komunikasi dan transportasi juga telah mendorong tumbuhnya kejahatan-kejahatan transnasional seperti terorisme, fundamentalisme, perdagangan wanita, anak-anak, penyeludupan, narkoba, dan berbagai perilaku amoral lainnya. Sementara sarana dan fasilitas serta kualitas SDM Departemen Agama dan lembaga-lembaga keagamaan belum memadai untuk mengantisipasinya. Pada sisi lain terjadi pula tuduhan pejoratif yang dialamatkan kepada kelompok agama tertentu di luar Indonesia, namun turut mempengaruhi kehidupan beragama di tanah air, termasuk di Sumatera Utara.

4.2.4.2. Bidang Hukum

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada dan dengan memperhatikan sepenuhnya visi jangka panjang dan sasaran pembangunan, maka isu-isu strategis pembangunan di bidang hukum ialah :

- 1) Adanya produk hukum - produk hukum sesuai dengan kewenangan daerah untuk mendukung peningkatan daya saing dan kesejahteraan daerah, masyarakat pada umumnya dan dunia usaha dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Sumatera Utara;
- 2) Penegakan hukum di seluruh lingkungan masyarakat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara secara tegas, konsisten dan berkeadilan;
- 3) Kesadaran masyarakat terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia.

4.2.4.3. Bidang Pemerintahan

Salah satu isu strategis dalam tata pemerintahan ialah aktualisasi *good governance and clean government*. Penerapan *Good Governance* (tata pemerintahan yang bersih), tidak dapat dilepaskan dari peran-peran pemerintah, peran masyarakat sipil, dan peran swasta. Perimbangan antar ketiga peran tersebut akan memberikan suatu kondisi keseimbangan yang menghidupkan proses demokrasi di Indonesia. Nampak jelas kebutuhan bagi dilaksanakannya deregulasi dan debirokratisasi untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya peran-peran yang optimal dari ketiga domain tersebut. Dengan demikian maka penerapan *Good Governance and Clean Government* tidak dapat dilepaskan dari SDM dari ketiga domain baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Ini berarti seberapa jauh kepehaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan para pelaksana akan memberikan pengaruh terhadap penerapan *Good Governance and Clean Government*.

Harus disadari bahwa lemahnya penerapan dan aktualisasi prinsip-prinsip *Good Governance and Clean Government* banyak dipengaruhi oleh keadaan, yang mana pada dasarnya SDM birokrasi belum sepenuhnya memahami apa sebenarnya *Good Governance and Clean Government*. *Good Governance and Clean Government* adalah merupakan suatu syarat mutlak untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Namun demikian, *Good Governance and Clean Government* dalam konteks proses dan bagaimana mengaktualisasikannya masih banyak yang belum memahami secara utuh.

4.2.4.4. Bidang Pelayanan Publik

Ruang lingkup pelayanan publik sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, hanya beberapa sisi saja yang diuraikan guna menjawab dan relevansi permasalahan yang yang dikemukakan dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Insan penyelenggara pelayan publik harus mampu menjadi pemimpin dimuka bumi, oleh karena itu seharusnya mempunyai sikap mental dan tekad : sekali menjadi pelayan jadilah pelayan yang baik. Pemilihan profesi menjadi pelayan publik ini hendaklah terhayati secara mendalam dan harus dilengkapi dengan pengetahuan yang luas di bidangnya. Dengan demikian rekrutmen penyelenggara pelayanan publik tersebut harus betul betul memperhatikan bidang keahlian dan menurut tatacara yang tepat dan taat menurut peraturan yang berlaku.

2. Fasilitas pelayanan publik.

Sebagaimana tertera Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, ruang lingkup pelayanan antara lain meliputi pendidikan pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup dan kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan sumber daya alam, dan pariwisata.

Peningkatan pengetahuan pada masing-masing ruang lingkup tersebut dalam lima tahun yang akan datang tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas atau sarana yang memadai seperti fasilitas perhubungan, fasilitas lingkungan hidup dan kesehatan, fasilitas pariwisata dan lain-lain.

4.2.4.5. Bidang Kesejahteraan Rakyat

- 1) Belum tercapainya Indeks Pendidikan yang berkualitas berdasarkan indikator Utama (1) Angka Melek Huruf, (2) Lama Sekolah dan (3) Angka Partisipasi Sekolah (khususnya pada jenjang PAUD dan Perguruan Tinggi);
- 2) Pelaksanaan pendidikan wajib belajar 12 tahun di Sumatera Utara masih jauh dari memadai walaupun telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan ;
- 3) Masih ditemukannya anak putus sekolah dan belum meratanya jangkauan dan kualitas pendidikan pada kabupaten/kota;
- 4) Masih rendahnya partisipasi SMA/SMK yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi;
- 5) Kualitas dan kompetensi guru/tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan;
- 6) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- 7) Belum tercapainya Indeks Kesehatan yang berkualitas berdasar indikator utama (1) Usia Harapan Hidup, (2) Angka Kematian Bayi, (3) Angka Kematian Ibu melahirkan, (4) Prevalensi Balita Kekurangan Gizi;
- 8) Belum meratanya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan (universal coverage);
- 9) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan;
- 10) Keberhasilan program Keluarga Berencana dalam mengurangi dampak tekanan demografi, masih belum didukung sepenuhnya oleh semua lapisan masyarakat;
- 11) Masyarakat Sumatera Utara telah berada dalam kondisi yang semakin peka terhadap masalah kesehatan. Pengadaan asuransi kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat telah merupakan kebutuhan yang mendesak;

- 12) Tekanan demografis terhadap pembangunan daerah Sumatera Utara sehubungan masalah pertumbuhan penduduk dan pelayanan KB semakin memerlukan perhatian yang semakin serius oleh semua pihak yang terkait;
- 13) Sumatera Utara masih berada dalam ketimpangan gender dalam arti perbandingan jumlah perempuan masih jauh dari keseimbangan yaitu laki-laki 49 % dan perempuan 51 %. Pemberdayaan perempuan merupakan solusi efektif yang untuk mengurangi resiko kegagalan kaum perempuan dalam melaksanakan peran mereka dalam pembangunan;
- 14) Sumatera Utara masih menghadapi situasi rawan dalam hal perlindungan anak termasuk perdagangan anak. Perlindungan anak secara melembaga dan profesional dirasakan semakin mendesak;
- 15) Pendewasaan berpolitik pada masyarakat akan semakin mendesak untuk menghindari masyarakat semakin berfikir praktis konflik-konflik horizontal dan vertikal;
- 16) Peningkatan budaya olahraga melalui pengembangan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga secara merata dan meluas, meningkatnya daya saing dan prestasi olahraga provinsi, terbangunnya sentra-sentra pembinaan olahraga untuk pembinaan olahraga usia dini dan olahraga prestasi serta identifikasi olahraga tradisional dan kontemporer menjadi industri olahraga dan pariwisata;
- 17) Permasalahan penyakit sosial di Sumatera Utara akan semakin bertambah dan bervariasi, tidak hanya masalah sosial konvensional saja yang tangani selama ini, seperti permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia, tetapi berbagai permasalahan sosial baru seperti pemutusan hubungan kerja, tawuran, kerusakan antar etnis, kesewenang-wenangan, penghakiman sendiri, termasuk di dalamnya permasalahan kelompok masyarakat mulai dari kelompok kelas bawah hingga kelompok elit, seperti disharmonisasi keluarga, stress, dan lain-lain;
- 18) Peningkatan partisipasi pemuda dan peran aktif pemuda melalui keterampilan, kewirausahaan, kemandirian, kepeloporan serta partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara yang dilandasi iman dan taqwa;
- 19) Peningkatan, pengembangan potensi diri agar memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa serta memiliki kecakapan hidup.

4.2.4.6. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

- 1) Masih terbatasnya sumber daya aparatur dengan disiplin ilmu tertentu;
- 2) Terbatasnya akses aparatur memperoleh pembekalan diri guna persiapan memasuki masa purnabakti;
- 3) Terjadinya eksese dampak pilkada terhadap penempatan aparatur/pejabat yang mengakibatkan tidak baiknya sistem pembinaan karir;
- 4) Kebijakan regulasi otonomi daerah membatasi kewenangan Provinsi dalam pembinaan kepegawaian di kabupaten/kota;
- 5) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam meningkatkan kinerja aparatur;

4.2.4.7. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Sumber Daya Alam

- 1) Provinsi Sumatera Utara yang sangat kaya dengan sumberdaya alam dengan dukungan sumberdaya manusia namun belum memiliki daya saing kuat baik di tingkat nasional maupun regional;
- 2) Dalam struktur ekspor-impor Sumatera Utara, komposisi ekspor bahan mentah sangat dominan dan impor bahan baku masih cukup tinggi. Hilirisasi produk-produk

sumberdaya alam Sumatera Utara seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan merupakan potensi besar dan sangat menunjang kepada peningkatan daya saing Sumatera Utara;

- 3) Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif masih tinggi, maka pengadaan lapangan kerja yang berkualitas bagi tenaga-tenaga kerja masih tetap mendesak;
- 4) Pembangunan ekonomi Sumatera Utara masih diwarnai oleh ketimpangan antar daerah sehubungan adanya kesenjangan baik dalam potensi sumber daya alam maupun sumberdaya manusia;
- 5) Pengembangan kluster ekonomi dan industri semakin mendesak untuk segera dilakukan;
- 6) Peningkatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam mendukung peningkatan daya saing produksi;
- 7) Kebutuhan modal untuk mengolah sumberdaya alam Sumatera Utara diperkirakan akan semakin meningkat sehubungan dengan luas dan besarnya infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan untuk mengolah sumberdaya alam Sumatera Utara, untuk itu investasi dalam dan luar negeri sangat dibutuhkan;
- 8) Sejalan dengan rencana pengambilalihan PT Inalum dalam waktu dekat, untuk meningkatkan kontribusi perusahaan industri hulu tersebut bagi pembangunan Sumatera Utara, hilirisasi produk ingot alumnium PT Inalum merupakan langkah strategis untuk dilaksanakan.
- 9) Luasnya perkebunan areal perkebunan di Sumatera Utara baik milik pemerintah maupun swasta. Telah tiba saatnya bagi Sumatera Utara untuk memperoleh bagi hasil dari perkebunan Sejalan dengan bagi hasil perkebunan ini, Sumatera Utara juga sudah saatnya menjadi salah satu pihak yang berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari bisnis Telekomunikasi, Migas dan pelabuhan laut.
- 10) Dalam rangka peningkatan pembangunan pertanian perlu dilakukan peningkatan kualitas bidang pertanian antara lain : peningkatan produktifitas dan nilai tambah pertanian dalam mendukung daya saing.

4.2.4.8. Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Pengembangan Wilayah, dan Mitigasi Bencana

4.2.4.8.1. Bidang Infrastruktur

A. Transportasi

Pemerintah telah menetapkan Bandara Kuala Namu sebagai Bandara Internasional, demikian juga pelabuhan laut Kuala Tanjung mendukung KEK Sei Mangkei dan ditetapkannya global hub port Kuala Tanjung pada sistem logistik nasional bagian barat Indonesia. Ketiga transfer point ini tidak akan berarti tanpa adanya sistem transportasi yang baik, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pengembangan sejumlah kawasan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi, sosial dan budaya wilayah, khususnya pada wilayah-wilayah strategis, cepat tumbuh, yang belum berkembang seperti wilayah pedesaan, wilayah dataran tinggi, wilayah pesisir, wilayah pantai barat, pulau-pulau kecil dan terluar, menuntut adanya prasarana transportasi yang cukup dan handal. Serta keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas. Sebagai prasyarat kawasan-kawasan strategis dan keterbukaan wilayah meliputi kawasan Mebidang-Ro, KEK Sei Mangkei, Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi, Agromarinepolitan di daerah pesisir, pulau-pulau terpencil, pulau-pulau terluar, kawasan pantai barat dan kawasan pariwisata. Dalam rangka menjalin

konektivitas antar provinsi perlu membangun jalan, jembatan dan transportasi perhubungan yang terkoneksi dengan provinsi tetangga. Sehubungan dengan itu, isu strategis yang perlu menjadi perhatian ialah:

1. Fasilitasi dan atau pembangunan infrastruktur transportasi ke kawasan strategis nasional dan provinsi, untuk mendukung pengembangan kawasan strategis tersebut, antar kabupaten/kota, provinsi dan antar negara, melalui peningkatan/pembangunan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara. Bentuk kegiatan yang dilakukan melalui peningkatan/pengembangan kapasitas/pelayanan pelabuhan, bandara, dan termasuk rencana mewujudkan Trans Sumatera, dan pengembangan transportasi pipa untuk distribusi CPO di Sumatera Utara.
2. Pengoperasian angkutan massal berbasis jalan di wilayah Mebidangro, dalam rangka mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi khususnya di wilayah perkotaan Mebidangro, melalui penyediaan pelayanan angkutan umum massal atau Mass Rapid Transit (MRT) antara lain Bus Rapid Transit (BRT), Monorail dan kereta api, yang berkualitas dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan Kereta Api commuter Mebidangro untuk meningkatkan peran KA Mebidang Sri Lelawangsa yang sudah beroperasi saat ini pada lintasan : Medan – Binjai ; Medan – Belawan dan Medan – Tebing Tinggi. Pengoperasian Kereta api commuter Mebidang sangat penting dalam mengurangi kemacetan lalu lintas jalan.
4. Pengembangan KA ke Kawasan Pantai Barat dan mewujudkan pembangunan Trans Sumatera Railway.
5. Pembangunan, pengembangan dan pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
6. Pengembangan Angkutan Pemadu moda di Bandara Kuala Namu dalam upaya meningkatkan mobilitas pengguna jasa angkutan udara ke Bandara Kuala Namu. Angkutan pemadu moda sebagai alternatif angkutan umum dari dan ke bandara selain angkutan kereta api, sangat penting untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi pengguna jasa angkutan udara / pengantar / pengujung bandara yang akan berdampak terhadap kemacetan lalu lintas. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan pemadu moda maka penyediaan pelayanan angkutan tersebut juga dilakukan melalui sistem tender terbuka dengan standar pelayanan mengacu kepada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Angkutan Pemadu Moda Berdasarkan Kualitas (Quality Licensing);
7. Pengembangan fasilitas di Bandara Kuala Namu melalui pembangunan Terminal VIP Bandara Kuala Namu. Terminal VIP Bandara Kuala Namu merupakan salah satu fasilitas yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Bandara Kuala Namu yang lokasinya sudah ditetapkan dalam Masterplan Pembangunan Bandara Kuala Namu. Kajian Feasibility Study dan Detail Engineering Design telah dilaksanakan pada tahun 2012;
8. Pengendalian emisi gas buang dari sektor transportasi sebagai salah satu sektor penyumbang terjadinya efek gas rumah kaca dari sumber bergerak. Kegiatan aksi mitigasi yang akan dilakukan didasarkan pada Rencana Aksi Daerah Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020;
9. Pengembangan pelayanan angkutan pesisir pantai timur dengan water bus dalam rangka mengurangi beban ruas jalan lintas timur Sumatera, sekaligus pengembangan wilayah pesisir pantai. Dokumen studi kelayakan telah disusun pada tahun 2009 dan secara bertahap juga telah dilakukan peningkatan kondisi beberapa pelabuhan dipantai timur yang akan dipersiapkan sebagai pelabuhan pendukung pengoperasian water bus dimaksud.

10. Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang dan Orang di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan keamanan, keselamatan, keteriban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain melalui kegiatan peningkatan pemeriksaan administrasi dan kelaikan teknis kendaraan bermotor dan pengawasan muatan angkutan barang di jembatan timbang (UPPKB).
11. Fasilitas dan atau pembangunan fasilitas keselamatan jalan yang dilakukan meliputi pemasangan fasilitas keselamatan jalan seperti : rambu, marka jalan, deliniator, guardrail. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi angka dan fatalitas kecelakaan lalu lintas khususnya di jalan provinsi.

B. Sumberdaya Air

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan diselenggarakan melalui Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, Pengendalian daya rusak air, penyediaan data informasi yang akurat dan handal serta pendayagunaan kelembagaan SDA yang dikelola secara terpadu dan terkoordinasi pada satuan wilayah sungai.

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya kebutuhan konsumsi pangan dan mempertahankan ketahanan pangan, meningkatnya kebutuhan pemukiman, peningkatan pertumbuhan industri, pertanian dan usaha lainnya maka isu Sumber Daya Air yang menjadi perhatian yaitu :

1. Penyediaan air baku bagi kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri dengan prioritas pertama untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara tepat waktu, kualitas dan kuantitasnya;
2. Meningkatkan kinerja dan berkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasi dan rawa sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi/rawa serta produktivitas air irigasi/rawa;
3. Untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan serta mengurangi alih fungsi lahan pertanian beririgasi harus lebih mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi dan menyediakan lahan beririgasi produktif;
4. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sering mengalami bencana banjir dan kekeringan, untuk mengurangi dampak banjir dan kekeringan diupayakan melalui peningkatan kapasitas aliran sungai, berfungsinya bangunan prasarana pengendali banjir dan penataan pemanfaatan sempadan;
5. Perlindungan daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil dan terluar serta perlindungan daerah Danau Toba dari abrasi air Danau Toba;
6. Dalam pelaksanaan pengelolaan SDA sangat diperlukan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* untuk berperan dalam meningkatkan rasa memiliki antara lain melalui pengembangan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif (PPSIP);
7. Untuk mendukung pengelolaan SDA sangat dibutuhkan dukungan system pengolahan data dan informasi SDA yang cepat, tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh *stakeholder*;

8. Untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang terpadu dan terkoordinasi (*one river-one management*) perlu diwujudkan melalui perencanaan pengelolaan SDA yang terpadu dimana implementasi program/kegiatan yang dihasilkan merupakan komitmen semua pihak untuk dilaksanakan dan meningkatkan koordinasi seluruh pihak, serta mengurangi konflik SDA;
9. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) diperlukan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak.

C. Energi

Potensi energi berupa panas bumi di Sumatera Utara sebagai energi alternatif yang tersebar pada beberapa tempat di Sumatera Utara, diantaranya di Kabupaten Karo, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Padang Lawas dan Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik Sumatera Utara.

Sumatera Utara juga memiliki indikasi kandungan minyak pada 2 (dua) tempat yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB dan Gunungsitoli, Kabupaten Nias.

Cadangan batubara terdapat di 15 (lima belas) titik dan gambut yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Timah putih merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi. Di Provinsi Sumatera Utara sebaran lokasi potensinya berada pada Aekhabil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah pada 1o45'03,3" LU 99o08'11,2" BT dengan jumlah cadangan sebesar 470 BSCF dan Desa Hatapang Kabupaten Labuhanbatu.

Ketersediaan energi listrik yang cukup dan andal merupakan infrastruktur dasar pembangunan. Dengan semakin terbatasnya sumber energi fosil, dilakukan upaya diversifikasi penyediaan dan pemanfaatan energi agar bauran energi menjadi lebih optimal.

Hal tersebut juga sejalan dengan upaya pengurangan dampak perubahan iklim (*climate change*) yang ada sehingga diperlukan untuk segera memanfaatkan energi alternatif secara bertahap dan berorientasi pasar. Kondisi yang terjadi saat ini pertumbuhan kapasitas pembangkit masih lebih rendah dari pertumbuhan kebutuhan listrik. Akibatnya pada waktu tertentu akan terjadi pemadaman bergilir beberapa daerah. Jika hal dibiarkan terus menerus akan mengganggu proses pembangunan. Kemudian jumlah desa tidak berlistrik masih cukup signifikan, ada sekitar 870 desa tidak berlistrik di Sumatera Utara. Untuk dapat memberikan dukungan yang baik dan cukup bagi pembangunan maka dalam 5 tahun ke depan provinsi Sumatera Utara harus dapat membangun 1.000 MW pembangkit. Kemudian ketersediaan gas alam, terutama bagi industri juga turut menjadi perhatian. Konsep pengembangan energi adalah sustainabel energi yang terdiri dari dua komponen utama, efisiensi dan energi terbarukan. Hal-hal inilah yang mendasari isu strategis dan kebijakan strategis tentang energi dan kelistrikan di provinsi Sumatera Utara dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Perlunya keterlibatan semua pihak terkait dalam pembangunan infrastruktur energi listrik yang berasal dari energi baru dan terbarukan;
2. Memerlukan sistem informasi sumber energi terbarukan yang ada di Sumatera Utara;

3. Memerlukan Desa Mandiri energi yang dapat dijadikan model pembangunan desa di Sumatera Utara. Desa ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu aksi mitigasi penurunan emisi GRK dan sekaligus sebuah desa yang dapat dijadikan desa "Agro-Edu Tourism". Pembangunan ini melibatkan pemerintah-industri-masyarakat dan perguruan tinggi;
4. Fakta yang ada penggunaan energi di Sumatera Utara masih tidak efisien. Perlunya efisiensi penggunaan energi pada industri dan bangunan yang menggunakan energi secara besar;
5. Perlunya keterlibatan institusi pendidikan vokasional (SLTA kejuruan), Politeknik, dan Perguruan tinggi dalam pengembangan inovasi pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan seperti energi air skala kecil mikro dan mini, sel surya, gelombang laut dan angin;
6. Memerlukan keterlibatan semua pihak terkait dalam perluasan penggunaan gas bagi rumah tangga dan industri;
7. Peningkatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam mendukung peningkatan daya saing produksi;
8. Perlu adanya penggunaan energi biomassa yang murah bagi industri kecil menengah dengan melibatkan masyarakat.

4.2.4.8.2. Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan 3 prinsip pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Provinsi Sumatera Utara harus menjadikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Isu pokok lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara dapat dibagi menjadi 3 topik besar, yaitu: alih fungsi lahan, penurunan kualitas lingkungan dan perubahan iklim. Penjabaran dari isu strategis lingkungan hidup ini antara lain adalah: alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan dan sawah menjadi peruntukan lainnya, Penurunan kualitas air sungai dan danau akibat limbah domestik, Penurunan kualitas udara akibat transportasi dan industri, Kerusakan terumbu karang dan hutan mangrove, keanekaragaman hayati, penurunan debit air sungai, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan masih rendahnya penegakan hukum lingkungan.

4.2.4.7.3. Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu. Landasan hukum kebijakan pembangunan maupun pengembangan wilayah di Indonesia terkait dengan penyusunan tata ruang nasional yang secara umum mengacu pada undang-undang tentang penataan ruang. Pedoman ini sebagai landasan hukum yang berisi kewajiban setiap provinsi, kabupaten dan kota menyusun tata ruang wilayah sebagai arahan pelaksanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dengan demikian, pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk menjadikan wilayah Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal ini sebagaimana tujuan perwujudan ruang wilayah nasional yang disebutkan di atas sebagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Berlandaskan penataan ruang, konsep pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara dibagi kedalam pusat pertumbuhan, integrasi fungsional, desentralisasi. Selanjutnya konsep pengembangan wilayah setidaknya didasarkan pada prinsip berbasis pada sektor unggulan atas dasar karakteristik daerah, dilakukan secara komprehensif dan terpadu, mempunyai keterkaitan kuat ke depan dan ke belakang, dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi.

Dalam rangka pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara, dalam 5 (lima) tahun ke depan ditargetkan instrumen pengaturan penataan ruang yang berarti juga pengembangan wilayah yaitu peraturan daerah (Perda) tentang rencana tata ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah ditetapkan dan menjadi landasan legal pengembangan wilayah masing-masing daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara. Perda rencana tata ruang dimaksud adalah berupa rencana umum tata ruang, rencana rinci tata ruang, serta peraturan pendukung dan pelaksanaannya seperti peraturan zonasi, peraturan insentif dan disinsentif, dan lainnya.

Sesuai dengan rencana tata ruang, pusat-pusat pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara dikembangkan dengan mengembangkan sarana prasarana, fasilitas, dan infrastruktur pendukungnya. Kota baru maupun kota metropolitan dikembangkan dalam pusat-pusat pengembangan wilayah tersebut berupa pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat kegiatan lokal (PKL), dan lainnya sesuai rencana struktur ruang wilayah.

Kawasan andalan dikembangkan di Provinsi Sumatera Utara agar wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat berkembang lebih efisien dengan fokus pengembangan pada produk unggulan wilayah sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN), di dalam kawasan andalan ini dapat dikembangkan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri dan kawasan fungsional lainnya untuk memaksimalkan pengembangan produk unggulannya sehingga memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap pengembangan wilayah. Di samping itu, pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara juga dapat dilakukan berdasarkan pengelompokan wilayah dengan kesamaan karakteristik, wilayah dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara dikembangkan sebagai kawasan agropolitan, sementara kawasan pesisir pantai dikembangkan sebagai kawasan agromarinepolitan.

Daerah dengan pemusatan penduduk yang cukup tinggi yang umumnya berada di daerah perkotaan, perumahan dan permukiman ditangani dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah. Pengembangan wilayah perdesaan juga dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan wilayah perkotaan dengan pemusatan penduduk yang cukup tinggi sehingga berdampak pada aglomerasi yang tidak menguntungkan dan tidak efisien.

Baik pusat kegiatan wilayah maupun kawasan pengembangan (seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perumahan permukiman, dan lainnya) umumnya diharapkan memberikan kontribusi nilai ekonomi bagi wilayah Provinsi Sumatera Utara, melalui pengelolaannya yang efisien atau hasil produksinya yang maksimal. Hal tersebut hanya akan terjadi sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Oleh karena itu, wilayah atau kawasan yang memiliki karakteristik yang berfungsi memberikan daya dukung lingkungan juga dikembangkan agar tetap berfungsi sebagaimana karakteristiknya. Kawasan taman nasional, kawasan hutan, maupun kawasan lindung lainnya dikembangkan agar dapat memberikan fungsi

perlindungan wilayah yang maksimal. Demikian juga kawasan strategis lingkungan hidup seperti kawasan Danau Toba dikembangkan agar dapat memberikan nilai lingkungan yang optimal.